



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN
KEUANGAN

Juni 2026



Transformasi Media Layanan Informasi DJPK

Sejak **16 Juni 2025**, kanal layanan Contact Center DJPK berkonsolidasi dengan kanal layanan Kemenkeu PRIME. Selanjutnya, mulai **20 April 2026**, Contact Center DJPK memasuki tahap pra-*Single Point of Contact* dengan langsung menangani layanan melalui kanal Telepon dan WhatsApp.

16 Juni 2025
Konsolidasi



0811-150-4207



callcenter.djpk
@kemenkeu.go.id



150420



djpk.kemenkeu
.go.id

MENJADI

20 April 2026
Pra-SPOC



0813-10004-134



kemenkeu.prime@k
emenkeu.go.id



134



kemenkeu-prime.
kemenkeu.go.id

Layanan DJPK yang
Tetap Aktif

Layanan Konsultasi Video
Conference

Melalui Aplikasi Reservasi Layanan Konsultasi Online
(RELASI DJPK)
(jam layanan hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB).

Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi melalui Kanal Publikasi DJPK



Ringkasan Publikasi dan Layanan Informasi

8

Publikasi Website



6

Webinar/FGD/
Workshop/



103

Publikasi Konten
Media Sosial



30

PPID



6

Blast Whatsapp/
Email



296

Tiket Konsultasi

Kondisi pra
Single Point of Contact



59

Email Reservasi
DJPK



21

Video Conference



4

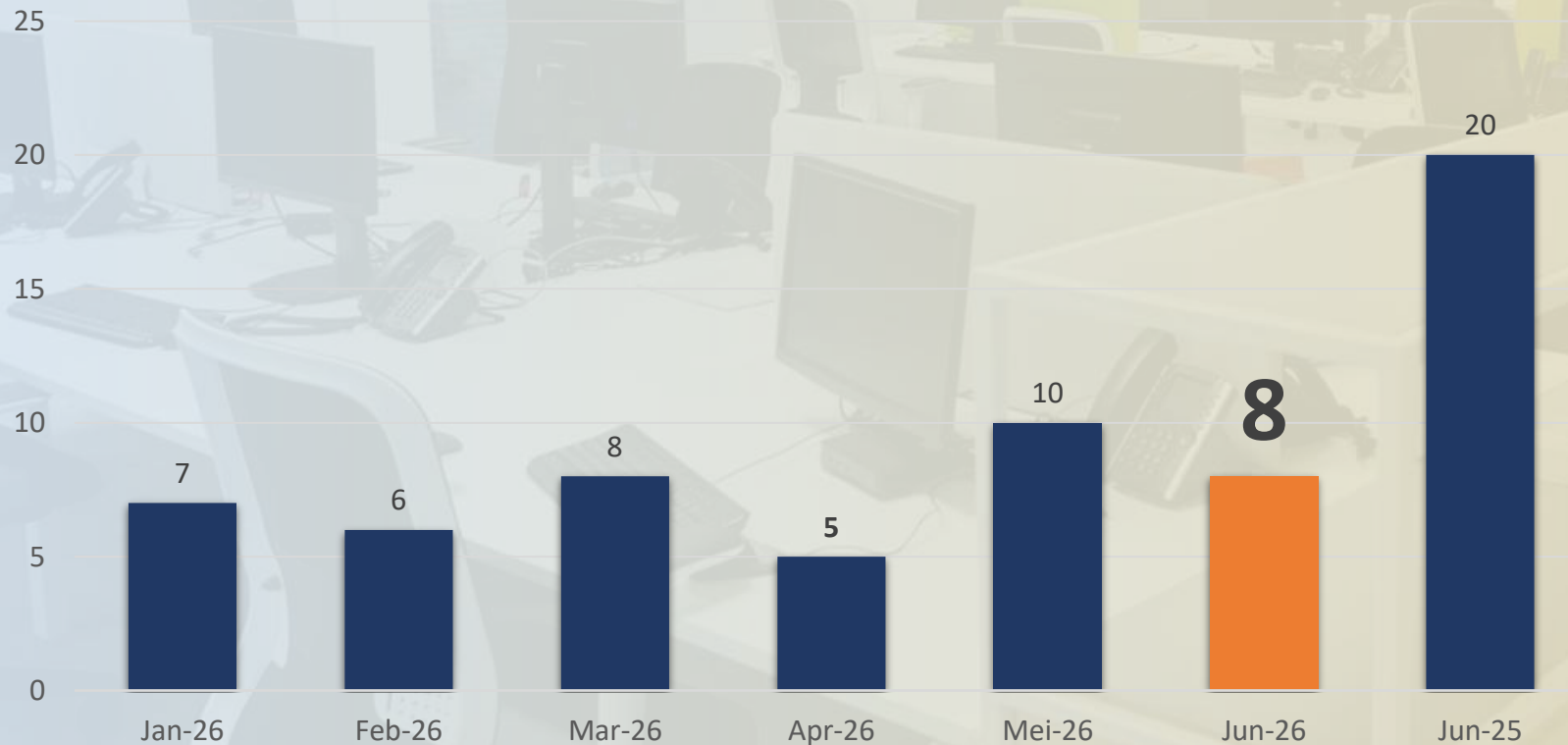
Konsultasi Tatap
Muka



Publikasi Website DJPK

Pada Juni 2026, terdapat **8 publikasi** pada *website* DJPK yang terdiri dari peraturan, informasi, dan konsultasi publik.

Jumlah publikasi Juni 2026 **turun 20%** dibandingkan bulan sebelumnya (10) dan **turun pula 60%** dibandingkan Juni 2025 (20).



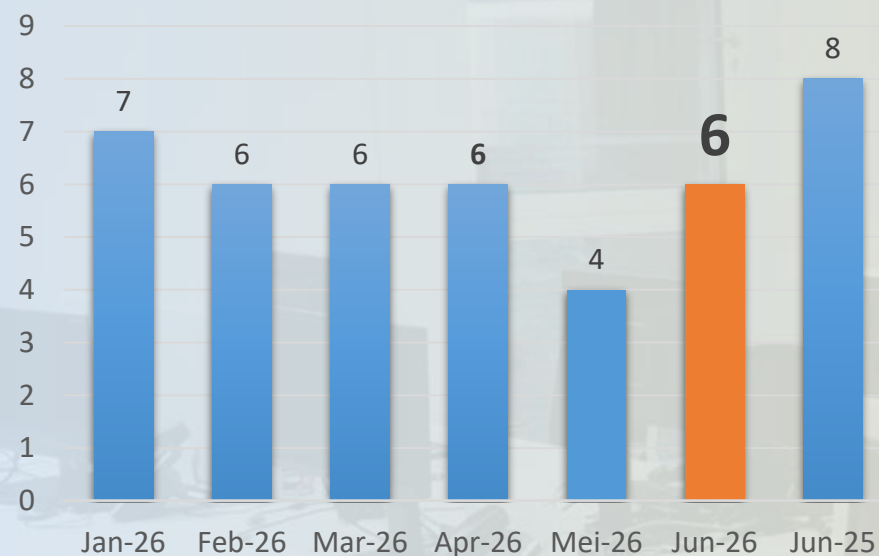
Rincian Publikasi Website



No.	Nama Publikasi	Jenis Publikasi
1	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Peraturan
2	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Konsultasi Publik
3	S-52/PK/2026 tentang Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah dalam Rangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Tahun Anggaran 2027	Pemberitahuan ke Daerah
4	S-100/PK/PK.2/2026 tentang Pemberitahuan Syarat Salur DBH Tahun 2026	Pemberitahuan ke Daerah
5	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/MK/PK/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas KMK Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD	Peraturan
6	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/MK/PK/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas KMK Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD	Peraturan
7	<i>Landing Page</i> - Lomba Peran APBN dan APBD Bangun Daerah Tahun 2026	Informasi Publik
8	PDRD Lens Vol. I Edisi 6 Tahun 2026	Informasi Publik

Publikasi Webinar/FGD/Workshop

Perkembangan Publikasi Webinar DJPK



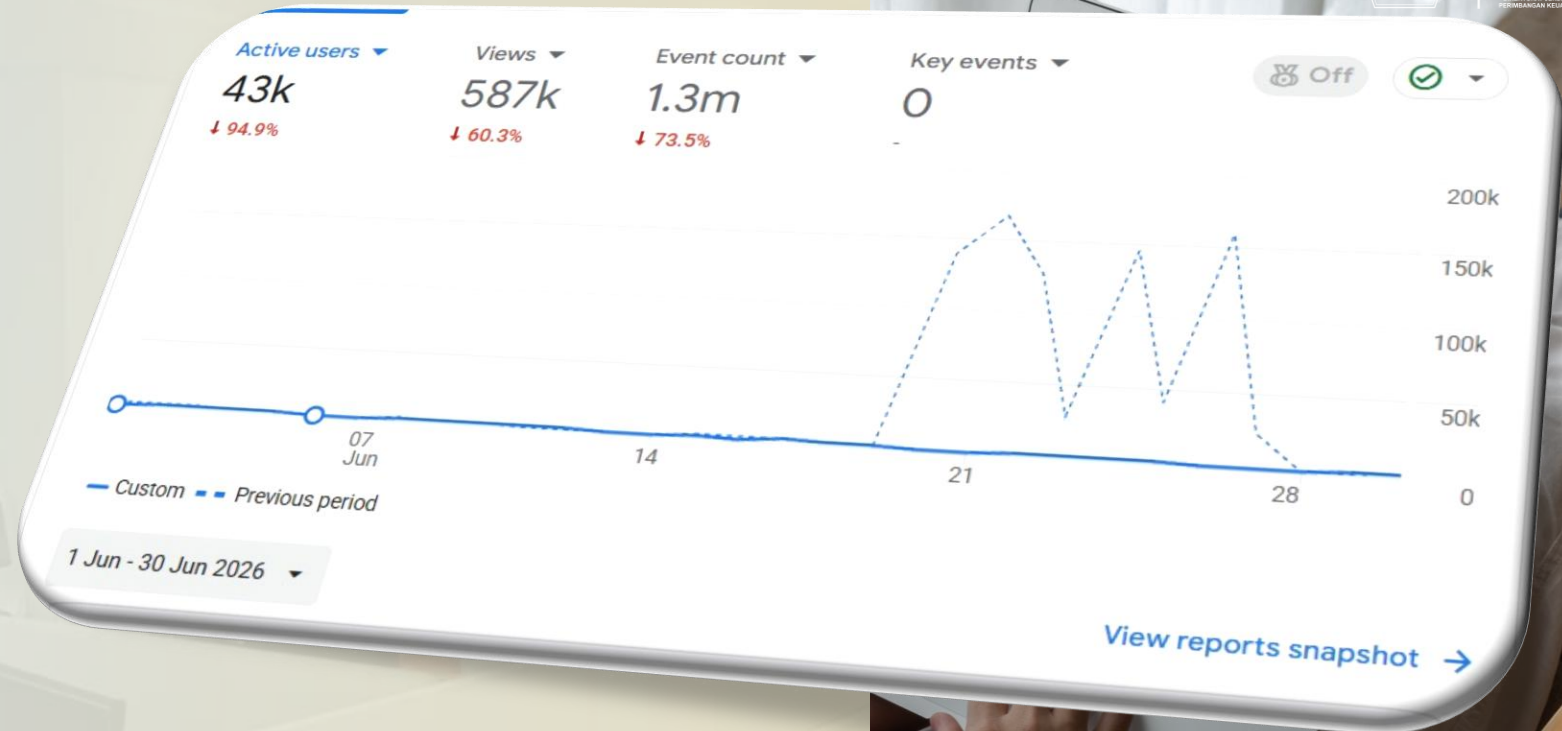
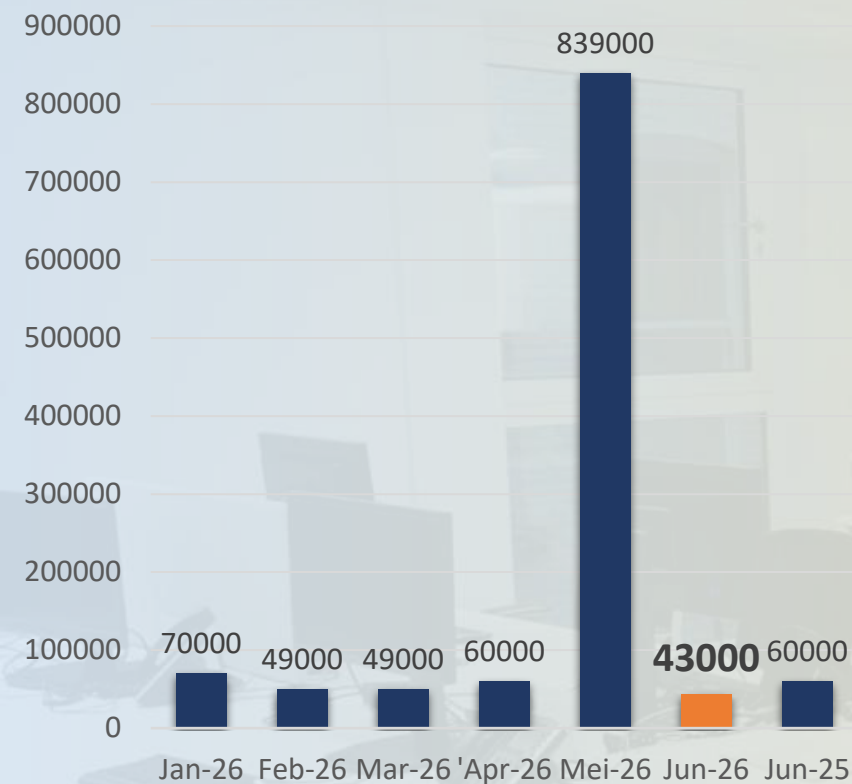
Publikasi webinar Juni 2026 **naik 50%** jika dibandingkan dengan publikasi bulan sebelumnya (4) dan **turun (25%)** jika dibandingkan dengan publikasi Juni 2025 (8).

No.	Nama Webinar	Jenis Webinar
1	Sosialisasi Antikorupsi dan Hari Lahir Pancasila	Sosialisasi
2	Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah	Workshop
3	Launching PERDANA TKD	Sosialisasi
4	Sharing Session DWP	Workshop
5	Sosialisasi PMK 35 Tahun 2026 tentang DAU dan DBH	Sosialisasi
6	THM Dirjen Perimbangan Kuangan	Workshop



Kunjungan Website DJPK

Perkembangan Kunjungan Website

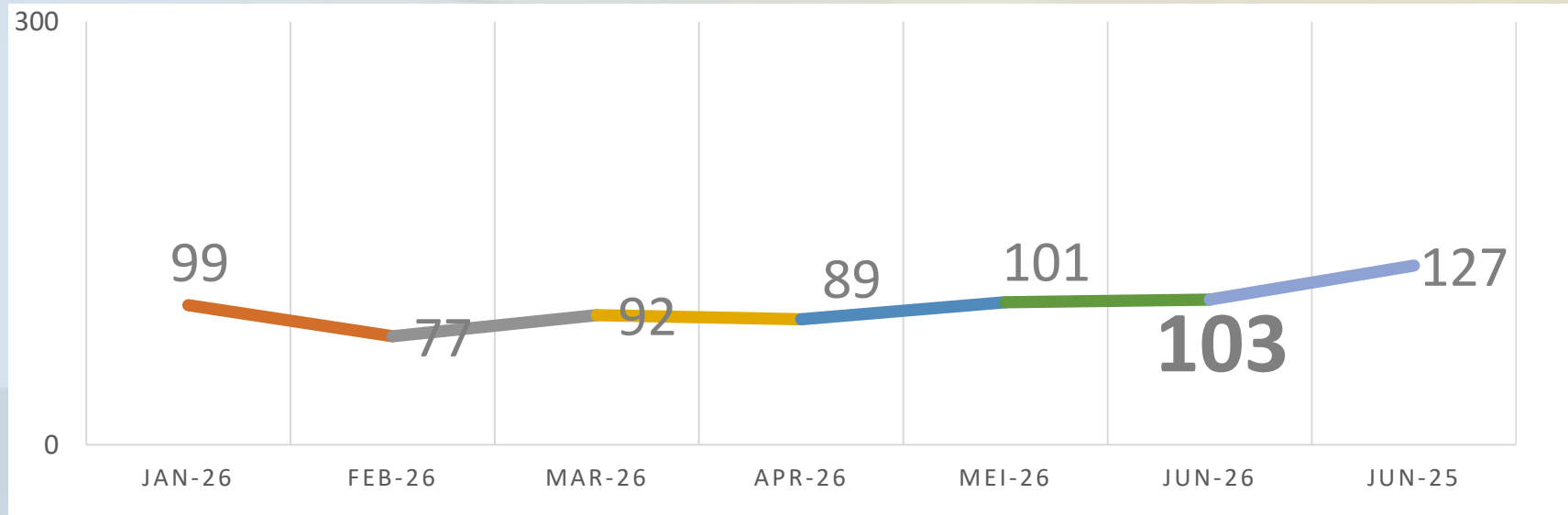


Jumlah pengunjung website DJPK pada Juni 2026 tercatat sebesar **43.000 pengunjung**. Secara bulanan, jumlah tersebut **turun 796.000 pengunjung atau sekitar 95%** dibandingkan Mei 2026. Sementara dibanding tahun sebelumnya, pengunjung Juni 2026 turun 17.000 pengunjung atau sekitar 28% dibandingkan Juni 2025 (60.000 pengunjung).

Halaman yang paling banyak diakses antara lain

- Portal Data SIKD
- Data APBD | Setelah TA 2006
- Rincian Dana Desa per Desa TA 2025
- Form Download Data APBD
- Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?

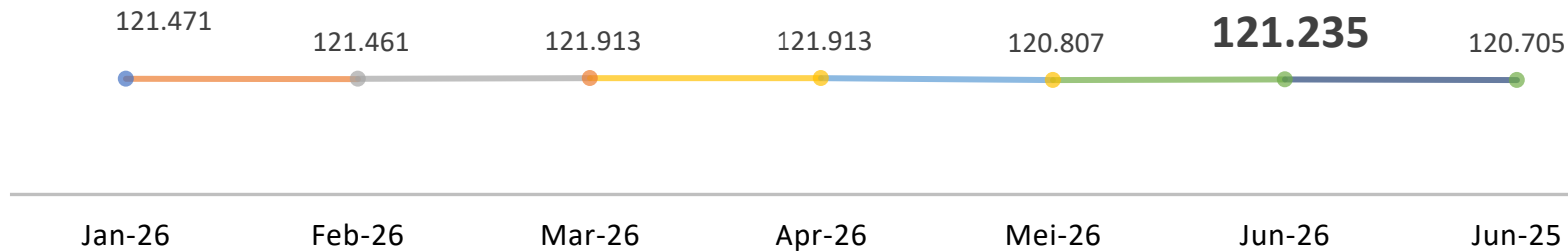
Publikasi Konten Media Sosial DJPK



1. Media Sosial DJPK terdiri dari Instagram (@ditjenpk), Twitter (@DitjenPK), Facebook (DJPK), dan Tiktok (@ditjenpk).
2. Jumlah publikasi konten media sosial DJPK pada Juni 2026 naik 2% dibanding bulan sebelumnya (101). Jika dibandingkan dengan Juni 2025 (127), jumlah publikasi turun 19%.



Grafik Perkembangan Pengikut Instagram



Followers (per 30 Juni)

121.235

Reach (total)

118.193

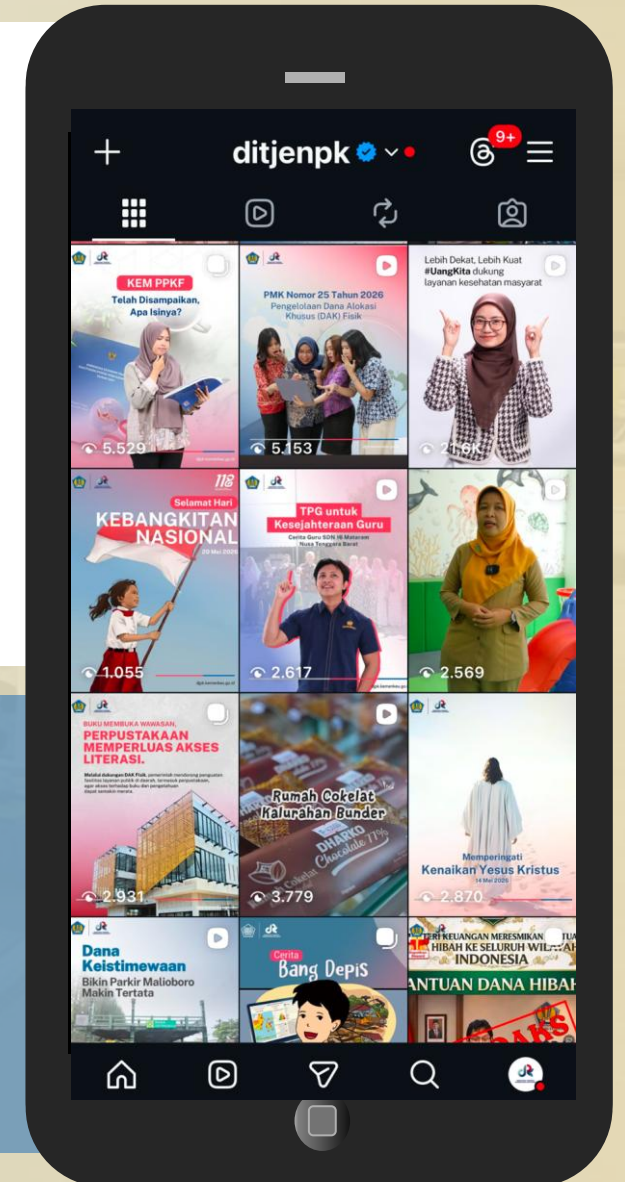
Reach (rata-rata)

4.925

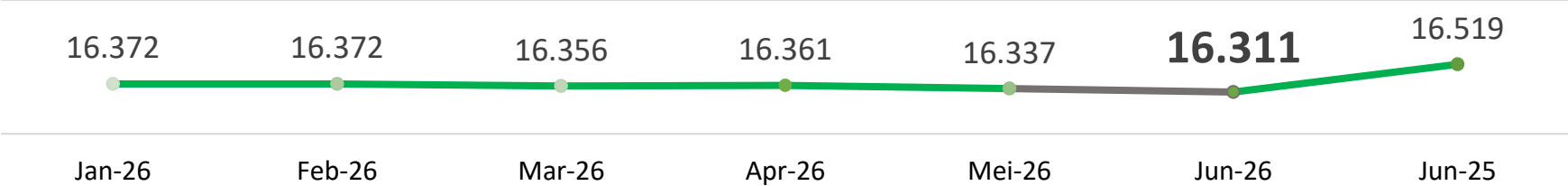
Jumlah Unggahan

24 feeds

17 story



Grafik Perkembangan Pengikut X (Twitter)



Followers (per 30 Juni)	16.311
Reach (total)	6.381
Reach (rata-rata)	277

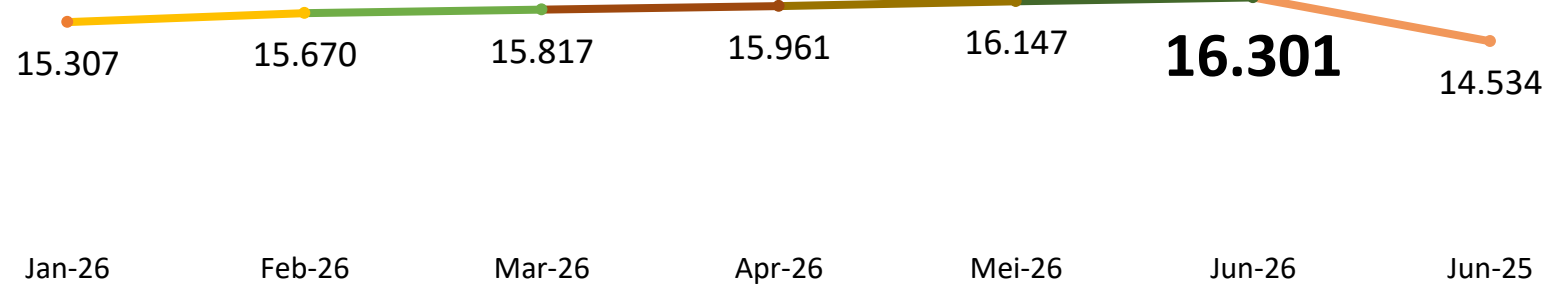
Jumlah Konten

35 Konten



Performa Facebook

Grafik Perkembangan Pengikut Facebook



Followers (per 30 Juni)

16.301

Total Reach

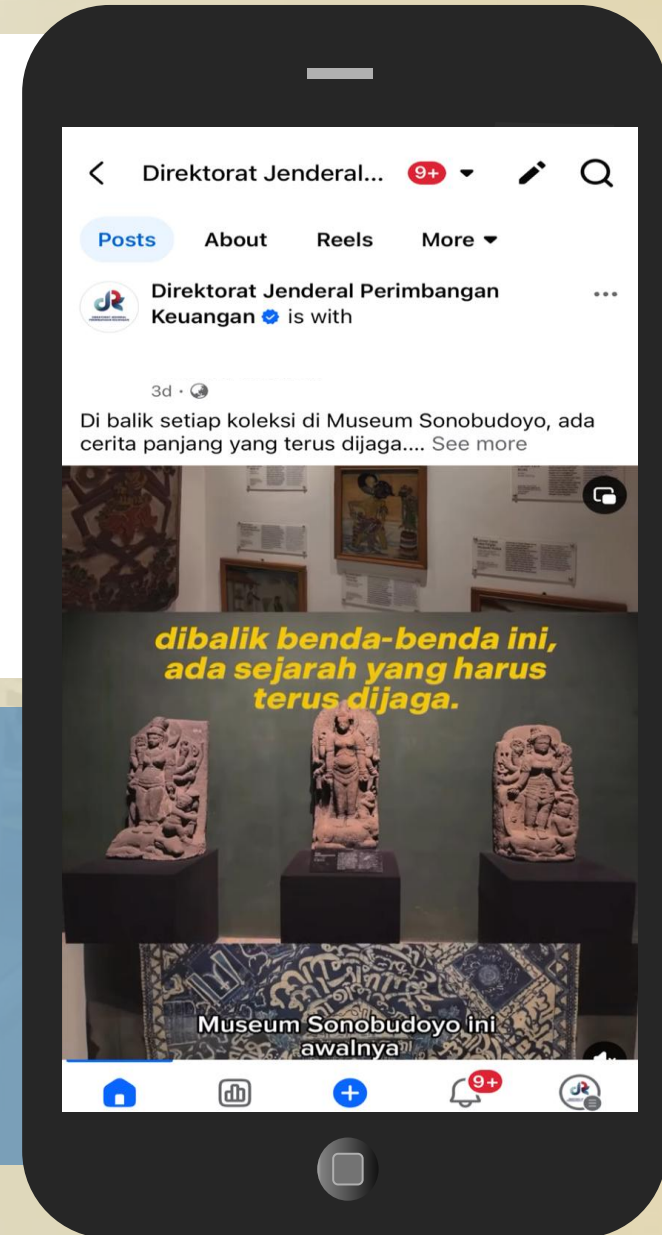
15.226

Reach (rata-rata)

609

Jumlah Konten

25 Konten



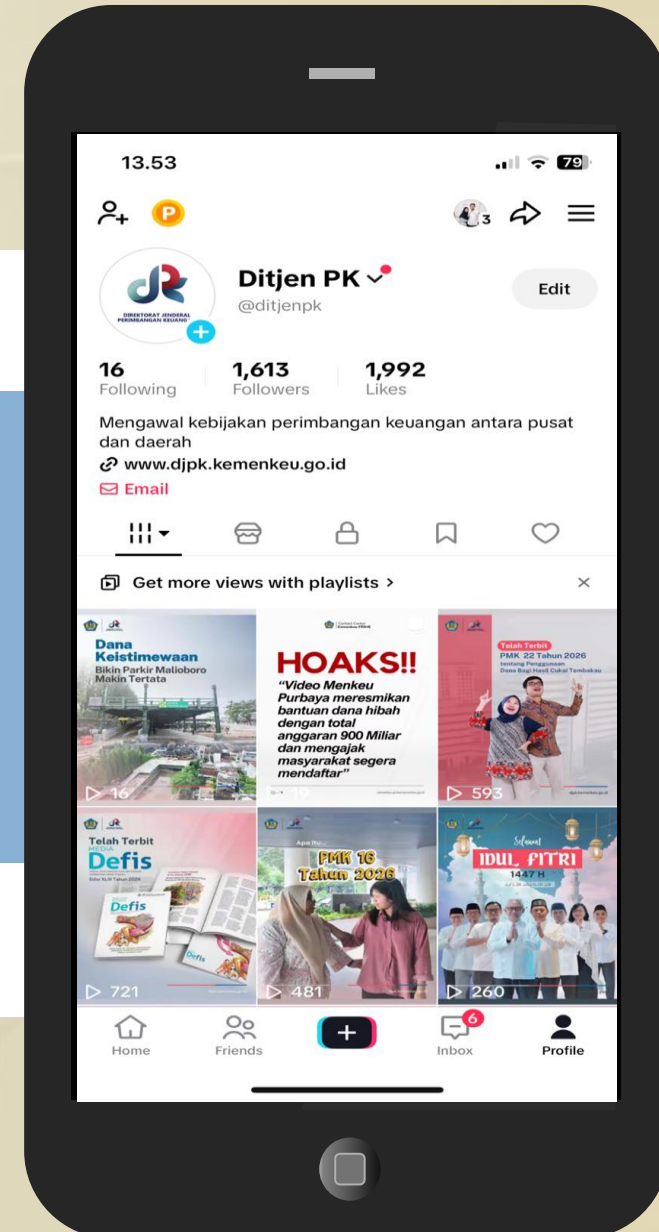
Performa Tiktok

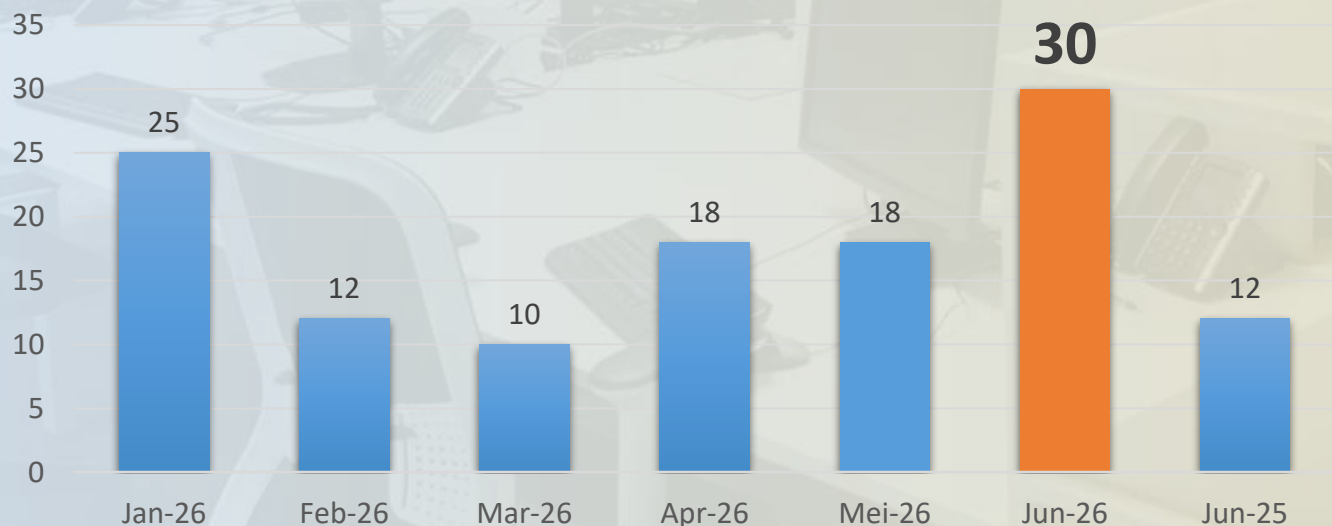
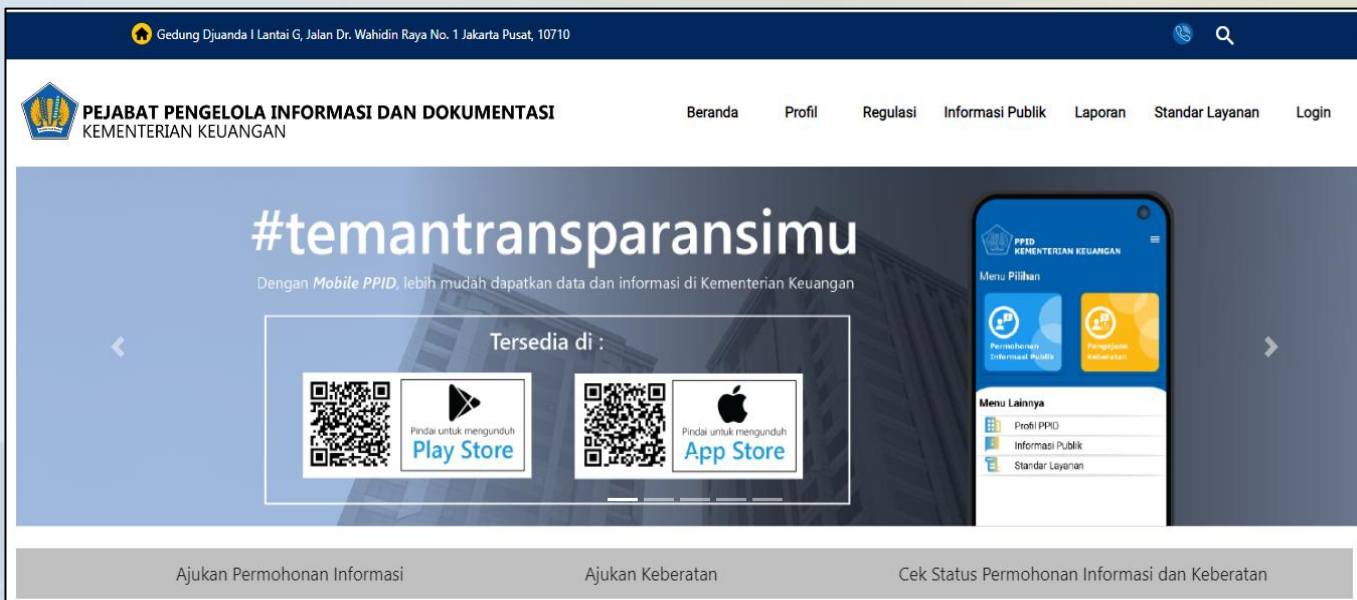
Dalam rangka memperluas cakupan penyebaran informasi, mulai Januari 2026, DJPK menambah 1 akun media sosial: Tiktok @ditjenpk

Followers (per 30 Juni)	1.611
<i>Total Reach</i>	2.076
Reach (rata-rata)	1.038

Jumlah Konten

2 Konten





Selain memublikasikan data dan informasi melalui *website* dan media lainnya, DJPK juga melayani permohonan informasi/data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK. Pada Juni 2026, terdapat **30** permohonan.

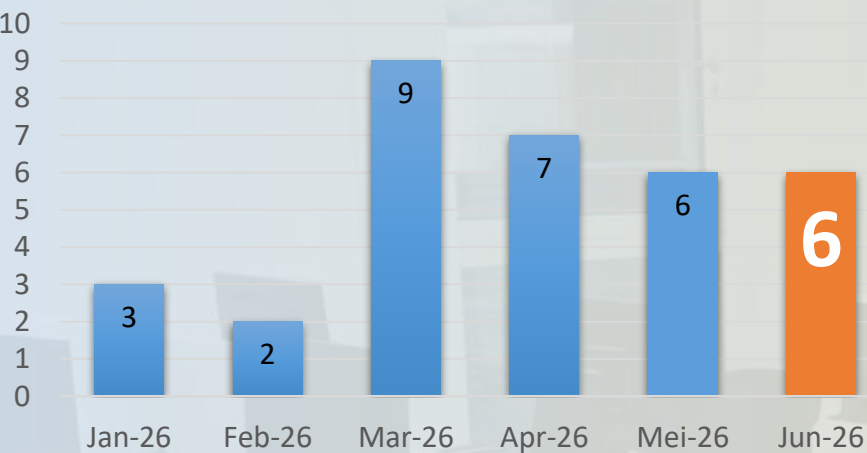
Sebagian besar permintaan data dalam rangka keperluan penelitian. Data yang diminta mencakup:

- Data anggaran dan realisasi APBD
- Data anggaran dan realisasi Transfer ke Daerah

Permohonan data pada Juni 2026 **naik 67% dibanding bulan sebelumnya (18)** dan **naik pula sebesar 150%** dibandingkan Juni 2025 (12).

Layanan *Email* dan *WA Blast*

Perkembangan Layanan *Email* dan *WA Blast*



Mulai 16 Juni 2025, layanan distribusi informasi melalui *email* dan *whatsapp blast* dilakukan oleh Kemenkeu PRIME dengan permohonan/korespondensi dari DJPK.

No	Jenis Blast	Nama Blast
1	WhatsApp dan Email	Pemberitahuan Perubahan Jadwal Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dalam rangka Hari Lahir Pancasila
2	WhatsApp dan Email	Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2026 hal Pemetaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah Dalam Rangka Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Tahun Anggaran 2027
3	WhatsApp dan Email	Penyampaian Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
4	WhatsApp dan Email	Penyampaian Informasi Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
5	WhatsApp	Penyampaian Surat Direktur Dana Transfer Khusus Nomor UND-108/PK.3/2026 hal Sosialisasi dan Asistensi Teknis DAK Fisik 2026
6	WhatsApp	Permohonan Undangan Asistensi dan Bimbingan Teknis Fitur Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (PERDANA)



Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME



Tiket Konsultasi DJPK

Perkembangan Jumlah Tiket Konsultasi



Mulai 20 April 2026, dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi DJPK, **Contact Center (CC) DJPK melaksanakan layanan *Pra-Single Point of Contact (SPOC)*** dengan menggunakan 2 akun telepon dan 2 akun whatsapp dari Kemenkeu PRIME.

679

Total tiket pra - SPOC
(20 April s.d. 30 Juni 2026)

296

Total tiket layanan Juni

238

WhatsApp (Juni)
80,5%

46

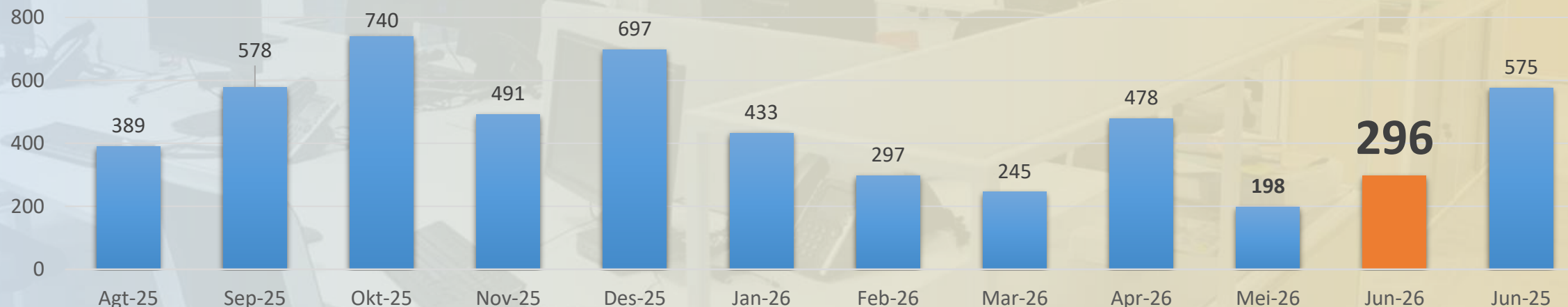
Email (Juni)
15,5%

11

Telepon (Juni)
3,7%

1

Live Chat (Juni)
0,3%



Jumlah konsultasi pada Juni tercatat sebanyak 296 layanan, **naik sebesar 49% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 198 layanan**. Sementara itu, bila dibanding Juni 2025 (575 layanan), tiket mengalami penurunan sebesar 49%.

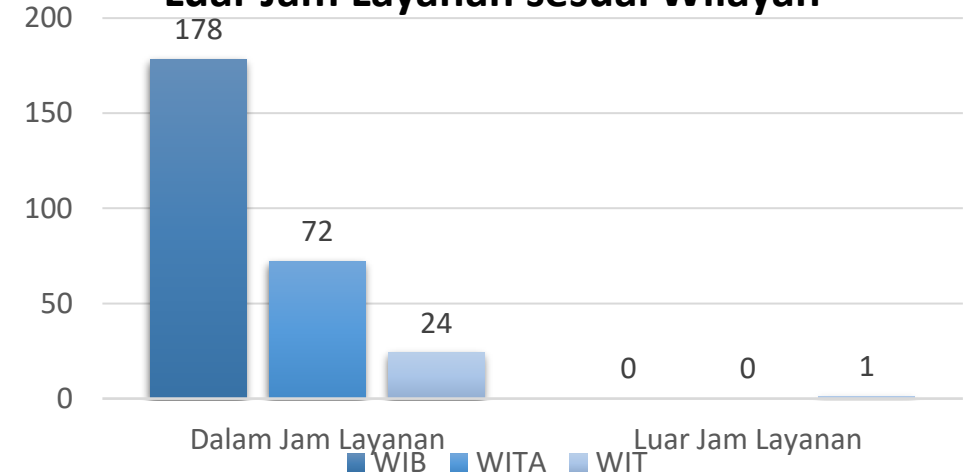
Rincian Tiket Konsultasi

Selama Juni 2026, dari total tiket konsultasi, sebanyak 275 tiket **dapat** diidentifikasi asal zona waktu, sedangkan 21 tiket sisanya **tidak dapat** diidentifikasi.

Dari 275 tiket yang dapat diidentifikasi zona waktunya, 274 pengguna layanan menghubungi DJPK di dalam jam layanan, sedangkan 1 sisanya menghubungi DJPK di luar jam layanan (pada Waktu Indonesia Bagian Timur).

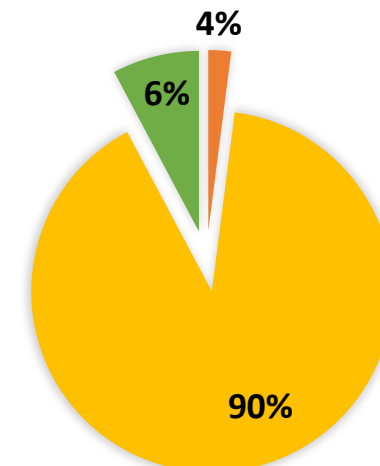
Dari total tiket layanan konsultasi DJPK, sebanyak 6 tiket (2%) ditangani oleh *agent* L1 Kemenkeu PRIME dan sebanyak 290 (98%) ditangani oleh *agent* L1 DJPK. Dari 290 tiket tersebut, sebanyak 267 tiket (92%) diselesaikan oleh L1 DJPK dan 23 tiket (8%) diselesaikan oleh *agent* L2 teknis DJPK.

Jumlah Pemda Menghubungi di Dalam dan Luar Jam Layanan sesuai Wilayah

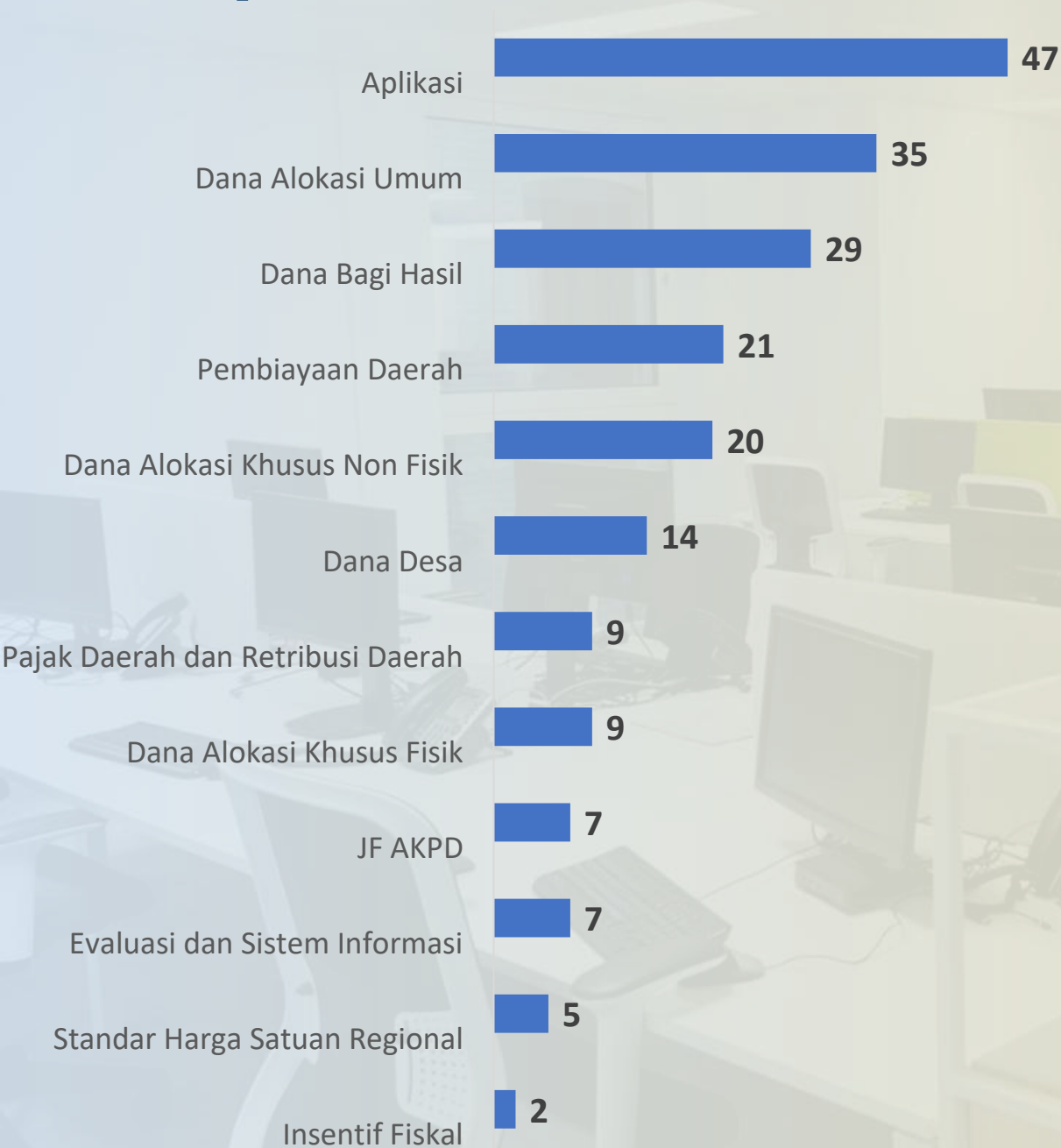


Persentase Penanganan Tiket

■ L1 - BIRO KLI ■ L1 - DJPK ■ L2 - Unit Teknis



Topik Konsultasi Teknis



Aplikasi

1. Informasi *update* data dan narasi CakLur pada SIKD; dan
2. Informasi penandatanganan LKT.

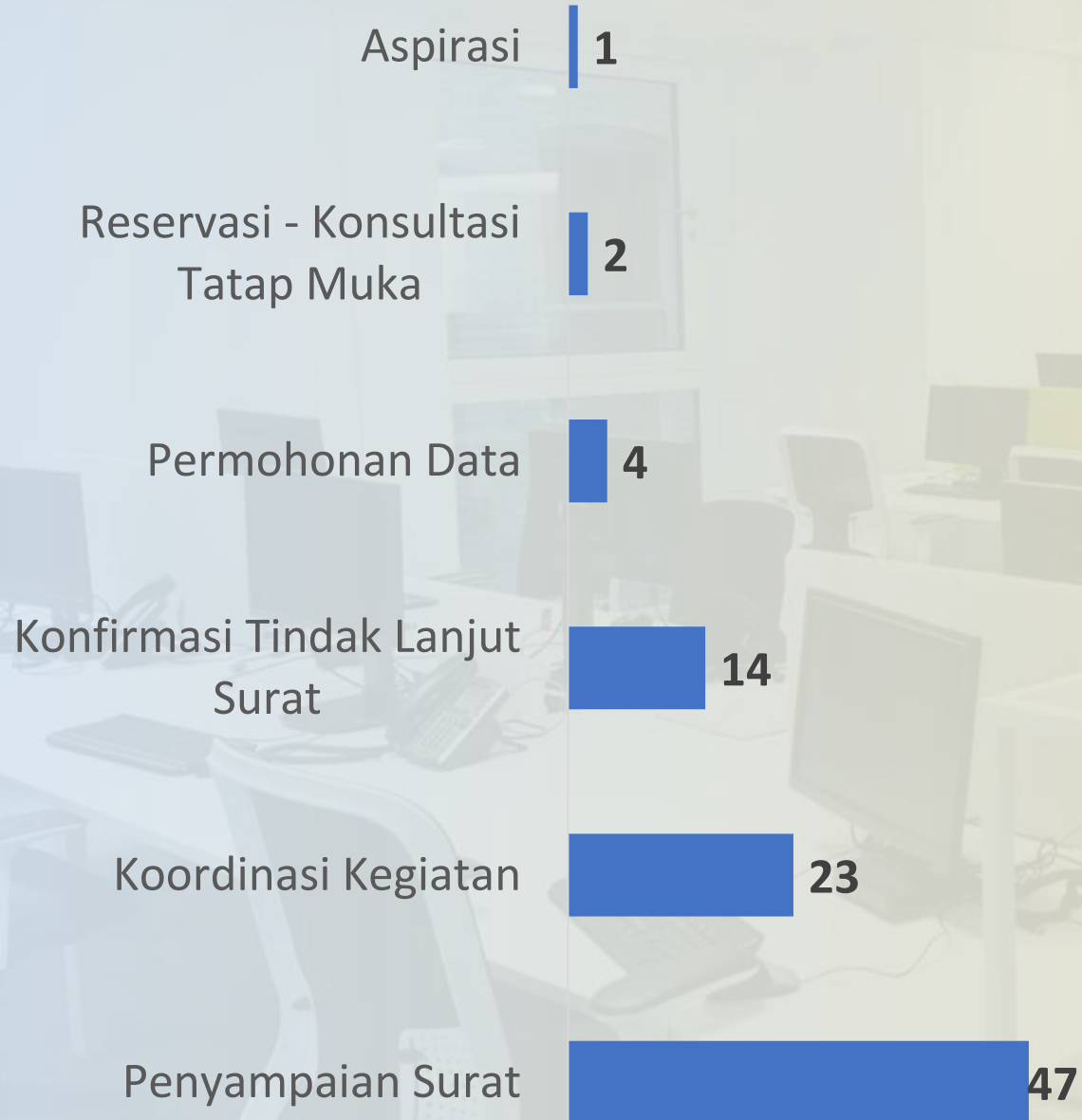
Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Informasi Penyaluran DAU SG; dan
2. Informasi Kebijakan Tambahan DAU TA 2026 dukungan pendanaan THR dan gaji ketiga belas.

Dana Bagi Hasil

Informasi terkait Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH.

Topik Konsultasi Non-teknis



Penyampaian Surat

Merupakan penyampaian surat masuk dengan tujuan DJPK.

Koordinasi Kegiatan

Informasi berkaitan reservasi konsultasi *video conference* dan tatap muka.

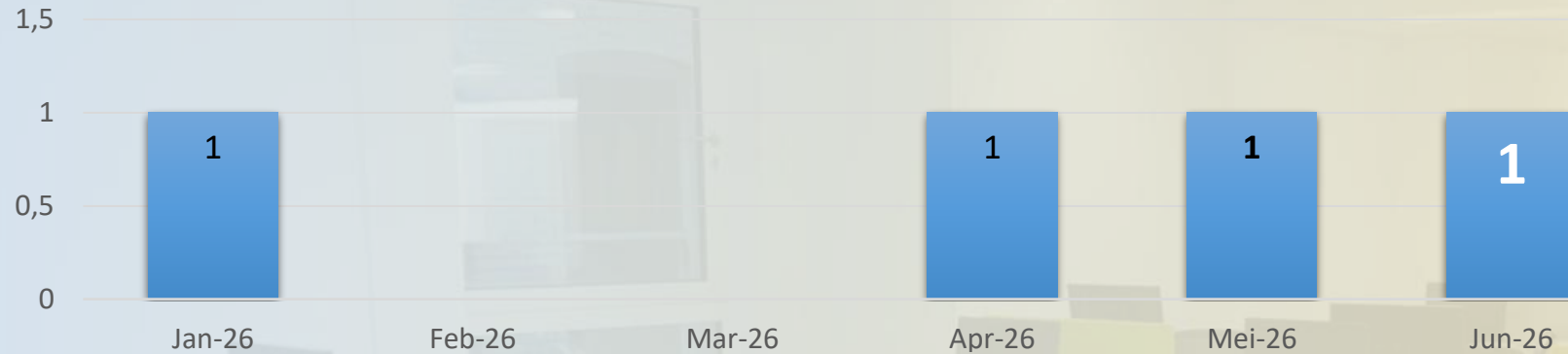
Konfirmasi Tindak Lanjut Surat

Konfirmasi tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan ke DJPK.

Permohonan Data

- Informasi terkait data yang tersedia dan tidak tersedia pada *website* DJPK.
- Informasi permohonan data melalui PPID.

Pengaduan/Keluhan/Aspirasi



Aspirasi

Pada Juni 2026, **terdapat 1 aspirasi dari pegawai kementerian/lembaga terkait dengan permohonan agar dapat disediakan kolom tulisan untuk publik seputar DJPK.**



Pengguna Layanan

82,8%

Pemerintah Daerah
245 Pengguna
(termasuk Anggota/
Pimpinan DPRD dan
Perangkat
Daerah/Desa)

9,5%

Kementerian/Lembaga
28 Pengguna
(Kementerian Teknis
dan Lembaga di dalam
dan luar Kemenkeu)

7,4%

Lainnya
22 Pengguna
(Masyarakat, Pendamping
Desa, Wartawan/ Media,
dan Swasta)

0,3%

Akademisi
1 pengguna
(Guru,Dosen,
Mahasiswa, dan
Siswa sekolah)



Pemda Pengguna Terbanyak

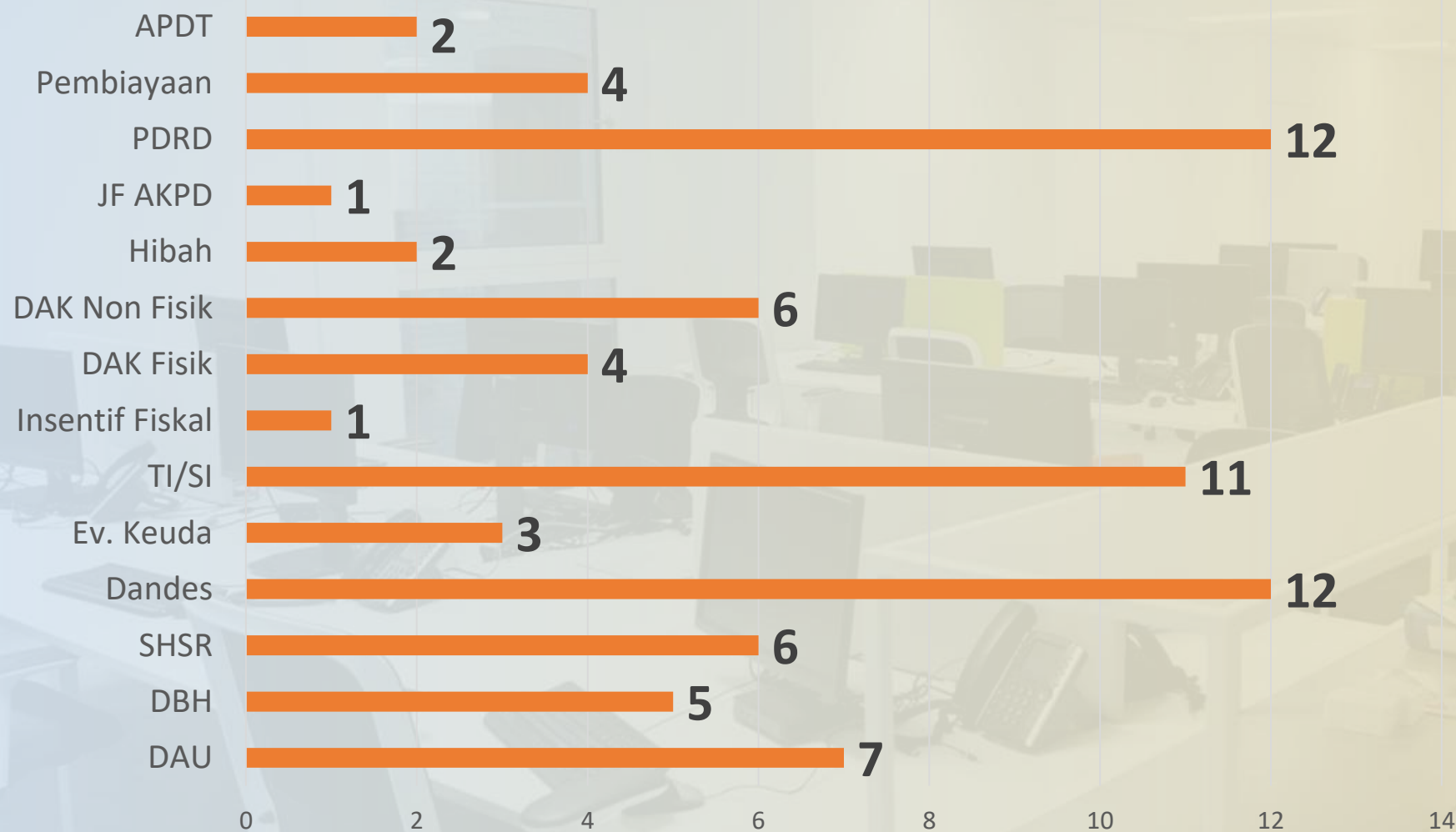


Kab. Nagan Raya (5 tiket),
konsultasi terbanyak terkait Transfer.

Kab. Kepulauan Aru (5 tiket),
konsultasi terbanyak terkait
DBH dan Surat Masuk.

Kab. Jayapura
(5 tiket), konsultasi
terbanyak terkait Aplikasi.

Jumlah FAQ/Knowledge Base Contact Center DJPK yang Perlu Di-review



**Data diperoleh dari FAQ bulan 3 (tiga) bulan terakhir pada tautan <https://bit.ly/FAQDJPK> berdasarkan isian pada kolom perbaikan.



Kepuasan Pengguna *Layer 1* (L1) DJPK



NADIA: ★★★★★
SANGAT BAIK



DIAN : ★★★★★
SANGAT BAIK



RISMA ★★★★★
SANGAT BAIK



RONALD : ★★★★★
SANGAT BAIK



HORAS : ★★★★★
SANGAT BAIK

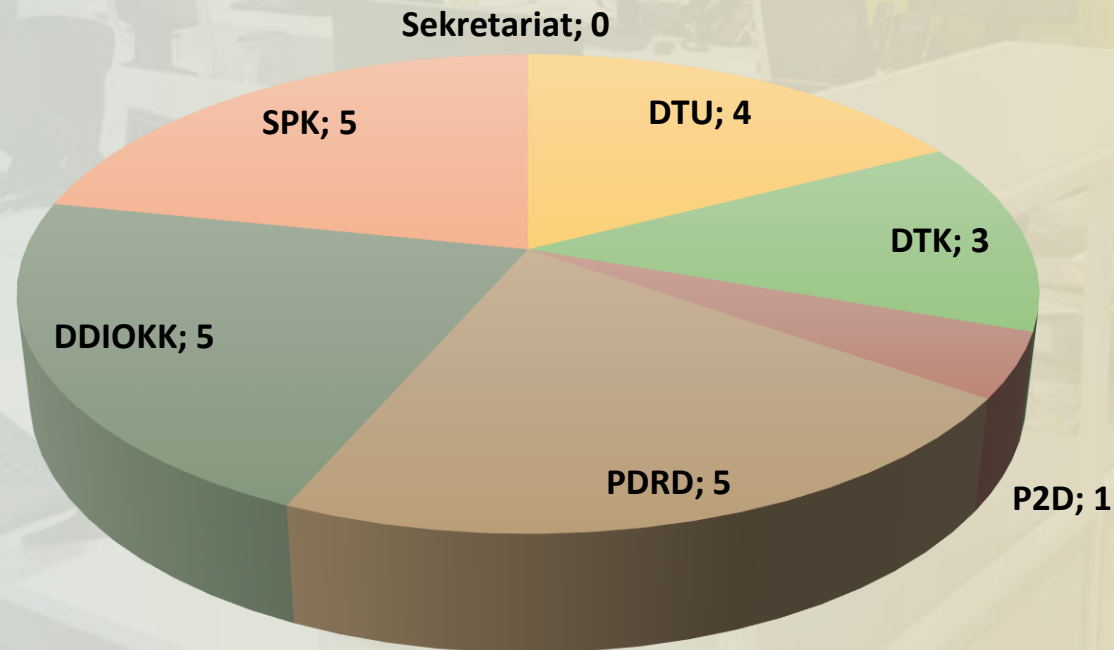
Penilaian Kepuasan Pengguna Layanan L1 DJPK menggunakan indikator *Customer Satisfaction Score* (CSAT) berdasarkan *feedback* yang diterima pada aplikasi CRM Deskpro. Adapun untuk *Best Agent* Juni 2026 diberikan kepada Kharisma Permata Karunianingtyas.



Layer 2 (L2) Unit Teknis DJPK

Mulai Juli 2024, Layer 2 (L2) melibatkan seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK. Sejak 20 April 2026, Unit Teknis DJPK yang sebelumnya berperan sebagai L3 telah berubah menjadi L2 Unit Teknis DJPK. Apabila diperlukan eskalasi, Agent L1 DJPK dapat meneruskan ke Agent L2 Unit Teknis DJPK.

23 Tiket Dieskalasi via Aplikasi CRM Deskpro ke Layer 2 pada Juni 2026



Layer 2 (L2) Unit Teknis DJPK

**Subdirektorat Program
dan Manajemen Pengetahuan,
Direktorat Sistem
Perimbangan Keuangan**

#1

The Best Team Kategori Tim dengan Kinerja Waktu Respon Tercepat (Capaian *Respon Time*: 2 tiket dengan capaian waktu rata-rata 120)

Keterangan:

120 : Tanggapan tiket diberikan pada hari H dan H+1
100 : Tanggapan tiket diberikan pada H+2 dan H+3
80 : Tanggapan tiket diberikan setelah H+3

**Tim Reguler Pelaksanaan Dana
Desa, Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan**

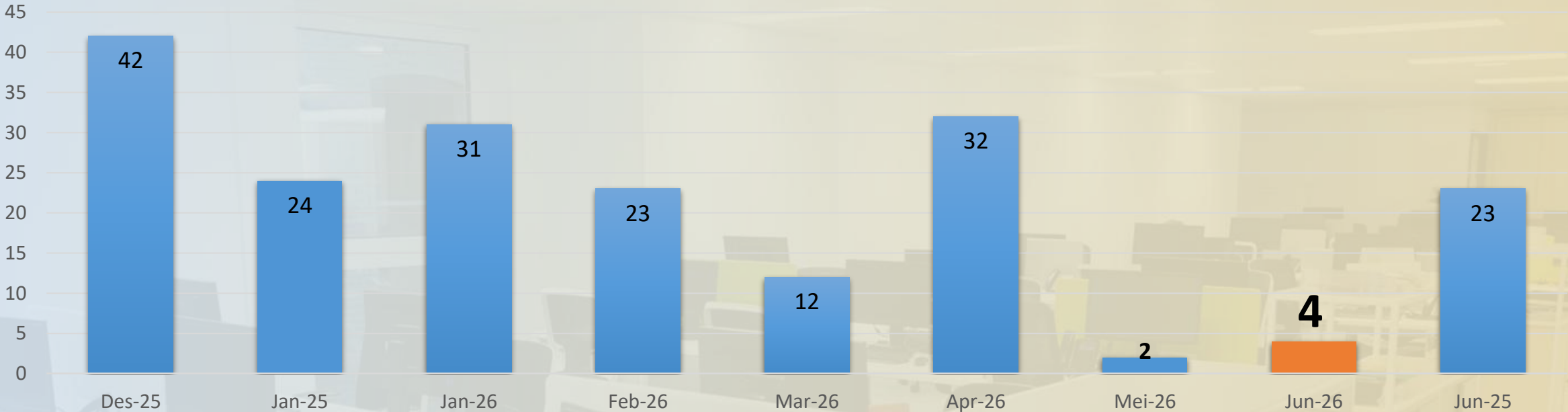
#1

The Best Team Kategori Tim dengan Kinerja Penanganan Tiket Terbanyak (menangani 5 dari 23 tiket: 22%)

Pengelolaan Komunikasi dan Layanan Informasi melalui Konsultasi *Video Conference*/Tatap Muka



Layanan Konsultasi Tatap Muka

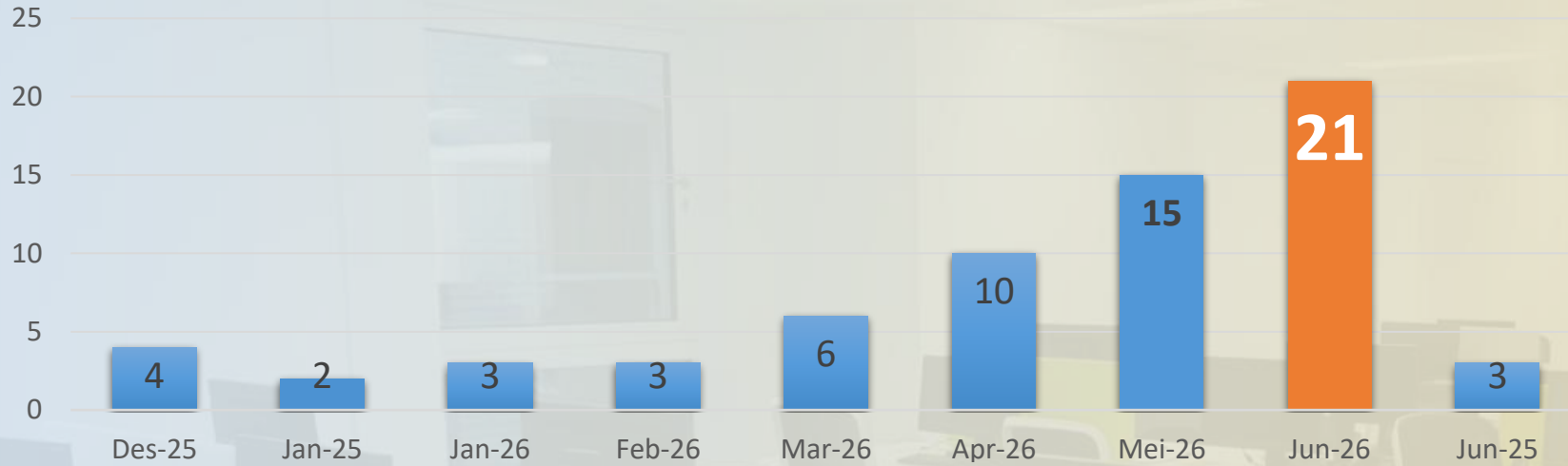


Dengan diimplementasikannya kebijakan konsultasi *full online* pada bulan Mei 2026, jumlah konsultasi tatap muka DJPK menurun signifikan. **Telah dilaksanakan 4 kali konsultasi tatap muka. Jumlah ini naik hingga 100% dibanding bulan sebelumnya (2), dan turun 83% dibandingkan Juni 2025 (23).**

Penurunan jumlah konsultasi tatap muka menunjukkan bahwa **mulai efektif mengalihkan pola layanan konsultasi dari mekanisme tatap muka menjadi berbasis daring.** Meskipun demikian, selama Juni, masih terdapat permohonan konsultasi tatap muka dari pemerintah daerah.

Tamu	Tanggal	Topik
Kab Gunung Mas	09 Juni 2026	DBH
Kab. Kupang	18 Juni 2026	TKD
Kab. Banggai Kepulauan	23 Juni 2026	DTU
Kab. Mappi	26 Juni 2026	TPP ASN

Layanan Konsultasi *Video Conference*



Pemerintah Daerah	Tanggal	Topik
Kab. Bengkulu Utara	02 Juni 2026	TPP ASN
Kab. Tanah Bumbu	02 Juni 2026	DBH
Kab. Dharmasraya	03 Juni 2026	DBH, DAU
Kab. Sidoarjo	03 Juni 2026	Jafung
Kab. Takalar	04 Juni 2026	DBH
Kab. Mappi	05 Juni 2026	DAU, OTSUS
Kab. Buton Utara	09 Juni 2026	DBH
Kab. Yahukimo	09 Juni 2026	Dandes
Kab. Jember	10 Juni 2026	Defisit APBD
Kab. Bungo	10 Juni 2026	TPP ASN
Prov. Jawa Barat	11 Juni 2026	DBH & Pajak Rokok
Kab. Manggarai	17 Juni 2026	Defisit APBD
Prov. Jawa Barat	19 Juni 2026	Pinjaman Daerah
Kab. Pulang Pisau	23 Juni 2026	Pajak Daerah
Kab. Dharmasraya	24 Juni 2026	DAU
DPRD Kab. Toba	24 Juni 2026	TPP & THR
Kab. Bangkalan	24 Juni 2026	DBH
DPRD Kab. Kutai Kartanegara	25 Juni 2026	TKD
PT. Krakatau Chandra Energi	25 Juni 2026	PBJT Tenaga Listrik
Kab. Deli Serdang	25 Juni 2026	Jafung AKPD
Kab. Indramayu	29 Juni 2026	Pinjaman Daerah

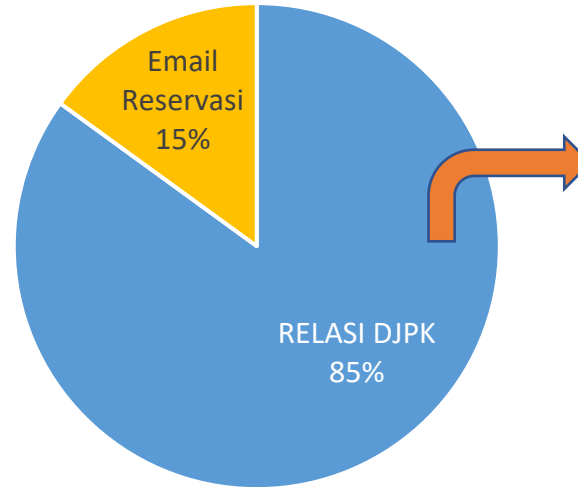
1. Seiring dengan implementasi kebijakan **konsultasi *full online* pada Mei 2026**, jumlah konsultasi melalui *video conference* mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode Juni 2026, telah dilaksanakan **sebanyak 21 kali konsultasi *video conference* melalui aplikasi Microsoft Teams**.
2. Jumlah tersebut **meningkat 40% dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 15 kali, serta meningkat 600% dibandingkan Juni 2025 yang tercatat sebanyak 3 kali**. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergeseran pola layanan konsultasi dari tatap muka menuju layanan daring, sekaligus mencerminkan bahwa mekanisme konsultasi *online* mulai dimanfaatkan secara lebih optimal oleh pemerintah daerah.



Aplikasi Reservasi Layanan Konsultasi Online (RELASI DJPK)

1. Pada bulan Mei 2026, DJPK telah melakukan *launching* aplikasi **RELASI (Reservasi Layanan Konsultasi Online)** sebagai media resmi bagi Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan konsultasi secara daring.
2. Aplikasi RELASI dapat diakses pada laman <https://djpk.kemenkeu.go.id> dengan memilih menu **Reservasi Layanan Konsultasi Online – Form Pendaftaran**.
3. Aplikasi ini dikembangkan untuk **mendukung pelaksanaan kebijakan konsultasi full online**, sehingga proses pengajuan, penjadwalan, verifikasi, dan pemantauan status konsultasi dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi.

Kanal Masuk Konsultasi Online

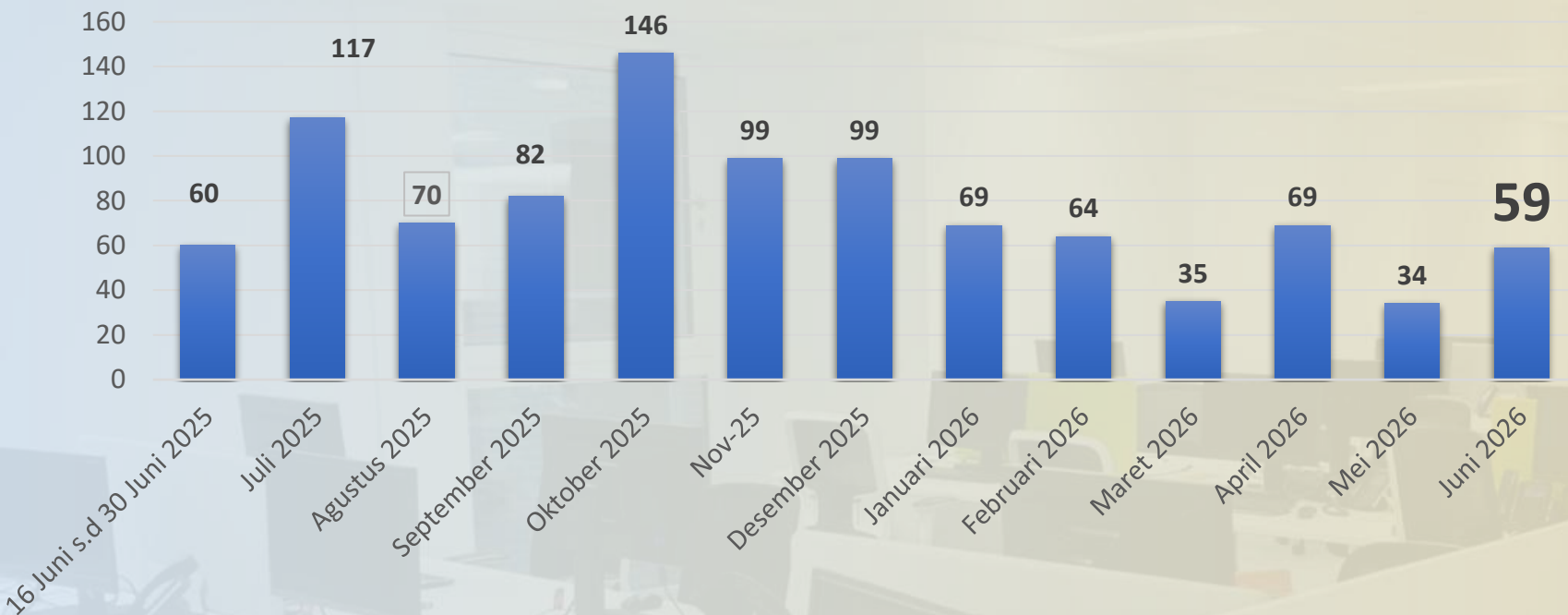


Status Permohonan RELASI Bulan Juni	Jumlah
Selesai/Terlaksana	17
Dibatalkan	10
Total Permohonan RELASI	27

Pada Juni 2026, DJPK telah melaksanakan **21 sesi konsultasi online**. Dari jumlah tersebut, **17 konsultasi atau 81%** telah diajukan melalui **aplikasi RELASI DJPK**, sedangkan **4 konsultasi atau 19%** masih masuk melalui **email reservasi dan WA**. Secara khusus, terdapat **27 permohonan yang masuk melalui RELASI DJPK**, dengan rincian **17 permohonan terlaksana** dan **10 permohonan dibatalkan**. Kondisi ini menunjukkan bahwa RELASI mulai digunakan sebagai kanal resmi konsultasi, namun masih diperlukan penguatan komunikasi agar pemda lebih konsisten menggunakan aplikasi dibandingkan email.

Layanan Reservasi DJPK

melalui email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id



1. Email Reservasi DJPK merupakan salah satu media penyampaian permohonan reservasi konsultasi DJPK (sebelum aplikasi tersedia).
2. **Jumlah email yang diterima s.d saat ini: 1.003 email** terkait permohonan konsultasi.
3. Agent Layer 2 DJPK bertanggung jawab sebagai tim reservasi yang bertugas menerima, menanggapi, dan mengkoordinasikan permohonan konsultasi yang masuk.



Evaluasi Layanan Informasi



1. **Mulai 20 April 2026, CC DJPK telah menerapkan mekanisme layanan pra-SPOC** dengan menangani langsung kanal Telepon 134 (Ext. 4 “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan Whatsapp (081310004134). Adapun untuk kanal email dan live chat masih melalui Agen Kemenkeu PRIME. Penerapan mekanisme ini memungkinkan CC DJPK dan pengguna layanan dapat melakukan komunikasi dua arah dan diharapkan kepuasan layanan informasi DJPK semakin meningkat.
2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi, adalah sebagai berikut.
 - a. Alur Bot Whatsapp Kemenkeu PRIME (untuk dapat berinteraksi dengan Agen DJPK harus melalui alur dan tahapan yang cukup panjang).
 - b. Pada kanal telepon mengalami kendala disebabkan beberapa telepon masuk menanyakan topik terkait LPDP (ext 4 sebelumnya menu LPDP).
 - c. Terdapat kendala teknis pada aplikasi Deskpro (kanal email dan live chat) sesuai dengan ND Kabiro KLI nomor ND-640/SJ.6/2026 hal Penyampaian Kondisi Gangguan Aplikasi Deskpro dan Pengelola Keberlangsungan Layanan dan Sociomile (untuk kanal whatsapp mengalami beberapa kali assignment bot error).
3. Berkenaan dengan kendala tersebut, pada tanggal 20 Mei 2026 telah diselenggarakan rapat pembahasan bersama Biro KLI, dan disepakati akan dilakukan upaya penyederhanaan alur bot WhatsApp di mana untuk terhubung dengan *agent* DJPK cukup memilih menu 4 (katalog layanan dan konfirmasi topik perimbangan keuangan pusat daerah).
4. Selanjutnya, DJPK terus melakukan evaluasi atas layanan *Contact Center* di masa Pra-SPOC untuk perbaikan ke depan.

Evaluasi Layanan Konsultasi DJPK *Full Online*

Pada bulan Mei 2026, telah diberlakukan kebijakan Layanan Konsultasi *Full Online*, dengan evaluasi sebagai berikut.

1. Implementasi layanan *konsultasi full online* mulai efektif menggeser pola layanan dari tatap muka ke daring. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan konsultasi tatap muka menjadi 2 kali pada Mei 2026 dan 4 kali pada Juni 2026 (bila dibandingkan dengan bulan dan tahun sebelumnya), sementara konsultasi *video conference* meningkat menjadi 21 kali.
2. Masih banyaknya Pemda yang mengajukan permohonan konsultasi melalui email reservasi, atas hal itu *agent* DJPK selalu mengarahkan Pemda untuk melakukan reservasi melalui RELASI. Ke depan perlu penguatan sosialisasi kepada stakeholder DJPK.
3. Untuk jangka panjang, Fitur RELASI akan menggunakan layanan berbasis *Customer Relationship Management* (CRM) Kementerian Keuangan.

Transformasi Layanan Konsultasi DJPK menuju *Full Online*

Pada bulan Mei-Juni 2026, dalam rangka implementasi kebijakan Layanan Konsultasi *Full Online*, kami telah melakukan beberapa upaya antara lain:

1. **Memutakhirkan SOP** Penjadwalan, Pelaksanaan, dan Dokumentasi Layanan Konsultasi DJPK.
2. **Membuat dan mengembangkan aplikasi RELASI (Reservasi Layanan Konsultasi Online) dalam website DJPK** sebagai media resmi bagi Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan konsultasi secara daring.
3. **Melakukan penyebaran informasi / blast** Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan **No. S-41/PK/2026 Tanggal 21 April** kepada seluruh *stakeholder* DJPK perihal Pemberitahuan Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK.
4. **Mempublikasikan konten** terkait Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK dan **video tutorial tata cara pelayanan RELASI** melalui konten Instagram DJPK.
5. **Sosialisasi kepada Seluruh Direktorat terkait Mekanisme Layanan Reservasi Konsultasi Online pada Senin 4 Mei 2026 dan Informasi ke seluruh Kanwil DJPb melalui ND Seditjen**
6. **Menyelenggarakan rapat** Pembahasan Mekanisme dan Dukungan dalam Pelaksanaan Layanan Konsultasi Online DJPK dengan melibatkan Subdirektorat PMP DJPK.
7. **Menyediakan media** dalam rangka pendokumentasian layanan konsultasi DJPK.
8. **Membentuk grup koordinasi** penjadwalan konsultasi yang melibatkan PIC konsultasi dari seluruh UE 2 sebagai forum komunikasi dalam rangka memastikan proses penjadwalan, konfirmasi kehadiran, dan koordinasi teknis pelaksanaan konsultasi berjalan lebih efektif dan termonitor.



TERIMA KASIH

Bersama, Kita Tingkatkan
Layanan Publik yang Lebih Baik

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat 10710
Gedung Radius Prawiro

